PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN PUBLIK, DAN *LEVERAGE* TERHADAP TINGKAT KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

RIZKIYANI MAZIDAH
05320/2008

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN PUBLIK, DAN *LEVERAGE* TERHADAP TINGKAT KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

Nama : RIZKIYANI MAZIDAH
NIM : 2008/05320
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Nelvirita, SE, M.Si, Ak	**Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**
NIP. 19740706 199903 2 002	**NIP. 19771123 200312 1 003**

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul	:	**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, dan *Leverage* terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI**
Nama	:	**Rizkiyani Mazidah**
BP/NIM	:	**2008/05320**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Fakultas	:	**Ekonomi**

Padang, April 2012

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Nelvirita, SE, M. Si, Ak	1.
2.	Sekretaris	Henri Agustin, SE, M. Sc, Ak	2.
3.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M. Si	3.
4.	Anggota	Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak	4.

SURAT PERNYATAAN

Saya yangbertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rizkiyani Mazidah
NIM/Thn. Masuk	: 05320/2008
Tempat/Tgl. lahir	: Jambi/11 Mei 1991
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jl. Talang betutu no. 8A Padang
No. Hp/Telepon	: 0852 74 413 445
Judul Skripsi	: **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Dan Leverage Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara ekslisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing,Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 14 Maret 2012
Yang menyatakan

RIZKIYANI MAZIDAH
NIM : 05320/2008

ABSTRAK

Rizkiyani Mazidah : **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Dan Leverage Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI "**

Pembimbing : **I. Nelvirita, SE, M.Si, Ak**
II. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan, 2) Pengaruh kepemilikan publik terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan, dan 3) Pengaruh *leverage* terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai 2010. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji t statistik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa (1) Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 0.133 > α 0.05 dan nilai t_{hitung} -1.517 < t_{tabel} 1.9879. (2) Kepemilikan publik berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 0.025 < α 0.05 dan nilai t_{hitung} -2.274 < t_{tabel} 1.9879. (3) *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 0.514 > α 0.05 dan nilai t_{hitung} -0.0514 < t_{tabel} 1.9879.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar perusahaan emiten melaksanakan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunannya sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam dan LK nomor Kep-134/BL/2006. Bagi investor, kreditor dan pemegang saham yang tertarik berinvestasi pada perusahaan manufaktur sebaiknya lebih memperhatikan lagi yang diungkapkan oleh perusahaan emiten, apakah yang dilaporkan perusahaan emiten telah sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam dan LK nomor Kep-134/BL/2006 dan pengungkapan sukarela selain pengungkapan wajib. Untuk penelitian selanjutnya perlu diidentitivikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan seperti profitabilitas, status likuiditas, manajemen laba dan dapat menggunakan jenis perusahaan yang berbeda dan rentang waktu penelitian yang lebih lama agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Dan Leverage Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI".** Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I, atas perhatian dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
2. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
4. Bapak ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawati yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.

7. Teristimewa kepada Ayah (Drs. Achmad Fauzi, M.Si**)** dan ibu (Tahmuda**)** tercinta yang telah memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Abang (Salman Alfarisi, SE**)** yang selalu memberi semangat dan ketenangan hati dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adikku yang tersayang (Widia, Selvy, Silvy, Zean, Nabila, Anggun dan semua nya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu**)** terima kasih telah tulus dan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat–sahabat dan teman–teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin….

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 15

C. Pembatasan Masalah 15

D. Perumusan Masalah 16

E. Tujuan Penelitian 16

F. Manfaat Penelitian 16

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori 18

1. Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan 18

a. Pendekatan Perilaku 19

b. Definisi Tingkat Pengungkapan Laporan keuangan 19

c. Sifat pengungkapan 21

d. Jenis-jenis pengungkapan 22

2. Ukuran Perusahaan 27

a. Pengertian Ukuran Perusahaan 27

b. Pengukuran Ukuran Perusahaan 29

3. *Agency Theory* Pada Stuktur Kepemilikan 30
4. Kepemilikan Publik..... 32
a. Pengertian Kepemilikan Publik 32
b. Pengukuran Kepemilikan Publik 37
5. *Leverage*..... 37
a. Pengertian *Leverage* 37
b. Jenis-Jenis *Leverage* 40
c. Tujuan dan Manfaat *Leverage* 42
d. Pengukuran *Leverage* 44
6. Hasil Penelitian yang Relevan 45
7. Hubungan antar Variabel Penelitian 50
a. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 50
b. Hubungan Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan..... 53
c. Hubungan *Leverage* terhadap Tingkat Pengungkapan keuangan Laporan Keuangan..... 55
B. Kerangka Konseptual 58
C. Hipotesis..... 62

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 63
B. Populasi dan Sampel 63

C. Jenis dan Sumber Data 65
D. Teknik Pengumpulan Data 66
E. Variabel Penelitian 66
F. Pengukuran Variabel 67
G. Teknik Analisis Data 70
H. Defenisi Operasional 74

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian 77
1. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur Di Indonesia 77
2. Jenis Perusahaan Manufaktur 78
B. Deskriptif Variabel Penelitian 79
1. Analisis Deskriptif 79
2. Statistik Deskriptif 91
3. Hasil Uji Asumsi Klasik 92
4. Pengujian Model Penelitian 96
C. PEMBAHSAN 102

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan 110
B. Keterbatasan 111
C. Saran Penelitian 112

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN 118

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Kerangka Konseptual 63

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Proses Pemilihan Sampel Penelitia 64
2. Daftar Perusahaan Sampel 65
3. Jenis Industri Perusahaan Manufaktur 79
4. Perkembangan Indeks Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur 81
5. Perkembangan Ukuran Perusahaan Perusahan Sampel 84
6. Perkembangan Kepemilikan Publik Perusahaan Manufaktur 86
7. Perkembangan *Leverage* Perusahaan Manufaktur 89
8. Statistik Deskriptif 91
9. Uji Multikoloniearitas 93
10. Uji Autokorelasi 94
11. Uji Heterokedastisitas 95
12. Uji Normalitas 96
13. Uji Koefisien Determinasi 97
14. Koefisien Regresi Berganda 98
15. Uji F *(F-Test)* 100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Proses Pemilihan Item Pengungkapan Sukarela 118
2. Daftar item-item Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib 120
3. Daftar Perusahaan Manufaktur dan Proses Pemilihan Sampel Penelitian . 124
4. Tabulasi Data Yang Diolah Dengan Spss 16 128
5. Hasil olahan data (out put) SPSS versi 16 133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Hukum mendefinisikan pasar modal sebagai "kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek" (Undang-undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995,ps 1).

Di Indonesia perusahaan yang telah *go public* dapat melakukan transaksi jual beli saham pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Proses transaksi saham tersebut diatur oleh sebuah badan pengawas pasar modal yaitu Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK). Perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar modal harus menyampaikan laporan perusahaannya ke Bapepam dan Lembaga Keuangan, yang berupa laporan tahunan.

Laporan tahunan (*annual report*) merupakan media untuk penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Hasudungan dan Didin, 2009:4). Manajemen perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai media untuk mengungkapkan informasi keuangan dan informasi non-keuangan kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Informasi yang

diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan ke dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam suatu laporan tahunan dan diatur oleh suatu peraturan pasar modal yang berlaku. Pengungkapan wajib di Indonesia diatur melalui Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, selain itu juga diatur berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tahun 1996 tentang Laporan Tahunan. Adapun pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek, Robert, and Gray, 1995) dalam Dody (2007:69).

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2005:578).

Investor menuntut informasi yang lebih detail dan lebih tepat waktu, maka pengungkapan wajib saja tidak cukup bagi investor, sehingga juga diperlukan pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan

minimum yang telah ditetapkan. Menurut Suwadjono (2005:583) menyatakan teori persignalan (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela ini.

Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan/bersifat sukarela, sehingga manajer tidak menjalankan prinsip pengungkapan (*disclosure*) dengan baik.

Bapepam dan LK sebagai badan pengawas pasar modal meningkatkan perannya dengan menerbitkan peraturan nomor Kep- 134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten (perusahaan publik). Dalam peraturan tersebut terdapat 85 item pengungkapan wajib sebagai pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.

Meskipun ketentuan mengenai pengungkapan telah dikeluarkan oleh Bapepam melalui peraturan nomor Kep- 134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten (perusahaan publik). Namun, pada kenyataannya banyak perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan sesuai dengan apa yang diinginkan investor dan peraturan berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan tersebut, sehingga investor dan *stakeholder* lainnya mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan.

Tingkat kelengkapan pengungkapan telah dibahas dan dianalisis oleh beberapa peneliti yaitu Iwan (2001), Simanjuntak dan Widiastuti (2004), Aida (2006), Bambang (2006), Luciana dan Ikka (2007), Ayu (2008), Hossain (2008), Meliana (2009), Suci (2009), Rika (2010), dan Ali (2011). Dalam beberapa penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah manajemen laba, leverage, likuiditas, profitabilitas, rasio kepemilikan publik, ukuran perusahaan, status perusahaan, umur perusahaan dan *profile* perusahaan.

Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan, ukuran perusahaan merupakan salahsatu yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran adalah alat untuk mengukur (penggaris, meteran, jengkal); bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda; panjang, lebar, luas, besar, sesuatu; hasil mengukur. Sedangkan perusahaan menurut Ismaya (2003:108) perusahaan adalah alat badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Jadi, bila pengertian ukuran dikaitkan dengan perusahaan, maka ukuran perusahaan dapat diartikan suatu alat yang digunakan untuk menentukkan besar atau kecilnya suatu badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba.

Menurut Sobirin (2007:13) ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan jumlah karyawan, jumlah penjualan, dan jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin banyak jumlah karyawan maka semakin besar

perusahaan, semakin banyak penjualan semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar jumlah aset maka semakin banyak modal yang ditanam.

Ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan tingkat pengungkapan. Menurut Luciana (2007:5) Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal, informasi untuk keperluan internal tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan total asset.

Alasan peneliti menggunakan total asset untuk mengukur ukuran perusahaan dibandingkan total penjualan dan jumlah karyawan. Karena total asset lebih menunjukkan perusahaan itu berukuran besar Menurut keputusan BAPEPAM NO 9 Tahun 1995 karena memiliki asser lebih dari Rp 20 miliar. Sedangkan total penjualan dan jumlah karyawan tidak bisa memberikan alasan yang akurat bagaimana ukuran perusahaan itu. Total penjualan bisa mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan kegiatan operasionalnya pada periode tertentu sedangkan jumlah karyawan, perusahaan terkadang enggan mempublikasikan jumlah karyawan nya di laporan tahunan.

Sedangkan perusahaan yang sumberdaya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan

pengungkapan selengkap yang dilakukan perusahaan besar. Dalam Penelitian ini ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Luciana (2007).

Selain itu, kepemilikan publik juga merupakan salah satu yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. kepemilikan publik dapat juga di sebut sebagai struktur kepemilikan, yaitu jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori stuktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusi, domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan, dan individual domestik (Anindhita, 2010:15-16).

Struktur kepemilikan sangat penting dalam tingkat kelengkapan pengungkapan, terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan yaitu kepemilikan oleh pihak luar dan kepemilikan oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan. Kepemilikan publik menunjukkan tingkat kepercayaan publik, yaitu pihak individu diluar manajemen perusahaan serta institusi lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

Saham publik merupakan jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar atau para pemegang saham. Semakin besar porsi kepemilikan publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang

perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan.

Semakin besar porsi saham yang dimiliki publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan (Dwi, 2010:55). Dalam penelitian ini kepemilikan publik diukur berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh publik/pihak luar terhadap total saham perusahaan. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Sugiono (2008).

Leverage juga termasuk faktor yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. *Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. *Leverage* bertujuan memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Kuswadi, 2005:88). *Leverage* dapat dibedakan atas dua jenis yaitu *operating leverage dan financial leverage.* Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham. Penggunaan pinjaman tersebut tentunya menutut adanya pertanggungjawaban perusahaan baik dalam pemakaian maupun pengembaliam pinjaman.

Leverage juga memiliki hubungan dengan tingkat pengungkapan. Perusahaan dapat menyakinkan pembaca laporan keuangan bahwa perusahaan mampu membayar hutang. Semakin besar *leverage* perusahaan, semakin besar kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham dan manajer.

Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi memiliki kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Penelitian ini menggunakan *leverage* yang diukur dengan membandingkan antara total hutang dengan aset dalam menilai investasi perusahaan.

Informasi mengenai penyajian pengungkapan dapat dilihat dari laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang telah *go public*, informasi tersebut dapat dilihat dari laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Sekarang ini jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut terus bertambah. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar tersebut dikelompokkan ke dalam 9 sektor industri. Adapun sektor industri yang paling banyak jumlah perusahaannya adalah industri manufaktur.

Kelompok industri dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola sumber daya menjadi barang jadi. Alasan peneliti mengambil perusahaan manufaktur mengacu pada peraturan Bapepam terbaru yaitu nomor Kep- 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten (Perusahaan Publik).

Alasan lain peneliti mengambil perusahan manufaktur sebagai sampel penelitian karena dari hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur lebih banyak diminati oleh investor untuk menanamkan sahamnya. Hal ini karena perusahaan manufaktur dianggap

perusahaan yang lebih banyak pemakainya, dan pada umumnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan besar, seperti PT. Unilever Indonesia. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. HM Sampoerna TBk, dan masih banyak perusahaan manufaktur lainnya yang menguasai pasar industrinya.

Perusahaan yang besar tentulah menjanjikan pengembalian saham yang lebih tinggi, maka dari itu tentulah para investor banyak melirik pada perusahaan manufaktur. Sebagai perusahaan besar dengan banyak pemilik sahamnya, pihak perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan publik terutama para investornya, dengan cara memberikan informasi-informasi perusahaan yang dibutuhkan untuk menentukkan kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten.

Industri manufaktur di Indonesia berkembang dengan pesat, masing-masing perusahaan bersaing untuk menguasai pasar dan mengeruk laba yang lebih besar. Namun di pasar modal, pergerakan saham bukan hanya disebabkan kepada ekspektasi masyarakat atau pasar terhadap perusahaan tersebut. Karena pada dasarnya menempatkan kepercayaan pasar sangat penting, sebab membeli saham bukan membeli barang, tetapi membeli kepercayaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengikuti peraturan di pasar sehingga bisa mendapat kepercayaan pasar.

Fenomena yang terjadi mengenai pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan di antaranya, banyak perusahaan emiten yang tidak menjalankan mekanisme keterbukaan informasi sesuai ketentuan, sebagai

contoh, kasus Bhakti Investama Tbk pada awal tahun 2010 tentang keterbukaan informasi Bhakti Investama Tbk ke publik yang dinilai tidak konsisten terkait aktivitas pergerakan harga saham yang tidak wajar. Awalnya Bhakti menyatakan tidak ada informasi bersifat material yang akan diberikan dalam waktu dekat. Namun, dalam penjelasan selanjutnya, perseroan mengaku sedang melakukan penjajakan awal untuk melakukan aksi korporasi.

Otoritas bursa meminta manajemen Bhakti Investama Tbk memberikan penjelasan lebih transparan. Permintaan itu menyusul adanya informasi yang simpang siur di pasar soal rencana aksi korporasi dalam waktu dekat ini dan berlanjutnya aktivitas saham Bhakti yang spekulatif. Apalagi, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai manajemen Bhakti Investama cenderung tidak konsisten dalam penyampaian keterbukaan informasi ke publik (http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=46663).

Kasus ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya keterbukaan informasi (pengungkapan) menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antara emiten selaku pihak dalam dengan para investor selaku pihak penyandang dana. Jadi antara fenomena yang terjadi sangat berbeda dengan teori, istilahnya disini masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan secara wajar informasi laporan keuangan kepada publik.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan diantaranya penelitian oleh Bambang (2006) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, porsi saham publik dan status perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dan variabel lainnya yakni *leverage, likuiditas, return on total asset, return on equity, operating profit margin* dan *net profit margin* tidak berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Luciana dan Ikka (2007) yang menganalisis tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Penelitian ini menemukan hasil bahwa karakteristik perusahaan yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan (wajib dan sukarela) adalah variabel rasio likuiditas, ukuran perusahaan dan status perusahaan, sedangkan variabel yang berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib yaitu variabel rasio likuiditas, rasio *leverage, size* perusahaan dan status perusahaan.

Selanjutnya penelitian lainnya oleh Suci (2009) yang menganilisis tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage,* dan status perusahaan terhadap luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menemukan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan sedangkan *leverage* dan status perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan.

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Dewi (2005), Aida (2006) membuktikan perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. menurut Dewi (2005) semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya.

Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi. Menurut Novalita (2009) ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa korelasi signifikan negatif.

Berdasarkan uraian peneliti-peneliti tersebut, dapat dilakukan suatu penelitian lanjutan yang menghubungkan antara ukuran perusahaan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan laporan tahunannya. Maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Karena ketidakkonsistenan penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat kelengkapan laporan tahunan.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Rika (2010) yang berjudul ”Pengaruh manajemen laba dan likuiditas terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan pada

perusahaaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia'. Adapun bedanya dari penelitian sebelumnya adalah pertama, mengenai variabel independen manajemen laba dan Likuiditas pada penelitian ini diganti dengan ukuran perusahaan, kepemilikan publik dan leverage. Hal ini bertujuan untuk melihat perbandingan yang lebih luas. Dimana dalam penelitian sebelumnya Manajemen laba dapat diukur melalui *discretionary accrual* (DA) yang dihitung dengan cara menghitung selisih antara *total akrual* (TA) dan *non discretionary accruals* (NDA) sedangkan variabel likuiditas diukur dengan membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian ulang dengan melakukan penyempurnaan seperti memperpanjang waktu penelitian dalam penelitian sebelumnya diambil data dengan kurun waktu 2 tahun (2006-2007) sedangkan dalam penelitian ini diambil data dengan rentang waktu 4 tahun (2007-2010) dan menambah sampel penelitian, dalam penelitian sebelumnya sebanyak 34 sampel perusahaan manufaktur sedangkan dalam penelitin ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 hanya 30 perusahaan manufaktur yang konsisten menyampaikan laporan tahunan selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010

Alasan penelitian ini penting dilakukan karena kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan tahunan yang dapat dilihat dari seberapa tingkat kelengkapan pengungkapan yang terpenuhi dalam suatu laporan tahunan perusahaan. Dimana dengan maraknya kegiatan ukuran

perusahaan, kepemilikan publik dan *leverage* dapat menggambarkan seberapa pengaruhnya terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Hal ini juga dapat lihat masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK nomor Kep-134/BL/2006 sebanyak 85 item tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten (perusahaan publik) dan dalam penelitian ini pengungkapan sukarela seperti yang digunakan oleh Choi dan Mueller (1992), Susanto (1992), Meek, Robert dan Gray Dewi (1995) dalam Fitri (2008) sebanyak 23 item, dikembangkan lagi dengan menambah item pengungkapan sukarela penelitian Rika (2010) sehingga menjadi 31 item pengungkapan sukarela.

Pengungkapan wajib saja belum seluruh diungkapkan oleh perusahaan apalagi pengungkapan sukarela. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ukuran perusahaan, kepemilikan publik dan *leverage* dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Bertolak belakang masalah yang telah diuraikan diatas, serta motif dari penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : ”**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik dan *Leverage* Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Tahunan”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?
2. Sejauhmana ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?
3. Sejauhmana kepemilikan publik berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?
4. Sejauhmana *leverage* berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?
5. Sejauhmana profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan publik, dan *leverage* terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

D. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas dan sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan
2. Sejauhmana kepemilikan publik berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan
3. Sejauhmana *leverage* berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?
2. Pengaruh kepemilikan publik berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?
3. Pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan?

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi investor, hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena dijadikan

bahan pertimbangan dalam masukan bagi investor dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi peneliti, mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai analisis yang dilakukan dan dapat memperdalam wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan, kinerja perusahaan dan struktur perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang memadai dalam melakukan dan melanjutkan penelitian yang sejenis dan serta menambah referensi terhadap penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengungkapan Informasi Dalam Laporan Tahunan

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2005:578). Menurut Evans (2003) dalam (Suwardjono, 2005:578) pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam statemen keuangan termasuk statemen keuangan itu sendiri, catatan atas statemen keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statemen keuangan.

Pengungkapan dalam pengertian tersempitnya mencakup hal-hal seperti data keuangan, laporan dewan komisaris, laporan direksi profil perusahaan, analisis pembahasan dan manajemen, tata kelola perusahaan, dan tanggungjawab direksi.

Perusahaan harus menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang mungkin, dengan batasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya.

a. Pendekatan Perilaku (*Behavior Approach*)

Pada pendekatan perilaku akuntansi diasumsikan berorientansi tindakan (*action oriented*) dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku secara langsung melalui isi informasi yang disampaikan dan secara tidak langsung melalui perilaku akuntan. Fokus dalam pendekatan perilaku ini adalah pada relevansi informasi yang dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan dan perilaku berbagai individu atau kelompok sebagai akibat dari disajikannya informasi akuntansi.

Pemakai terpenting laporan akuntansi, yang disajikan kepada mereka yang berada di luar perusahaan, biasanya dianggap mencakup para pemegang saham, investor, kreditur, dan badan badan pemerintah. Akan tetapi, teori-teori perilaku juga memperhitungkan pengaruh laporan eksternal pada keputusan managemen dan efek umpan balik dari tindakan para akuntan dan auditor. Jadi, teori-teori perilaku mencoba mengukur dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh ekonomi, psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan oleh prosedur-prosedur akuntansi alternatif dan media pelaporan.

b. Defenisi *Disclosure* Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2008:7). Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi saat ini merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

Laporan keuangan biasanya dibuat per periode sedangkan untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Laporan keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (SAK 1 September, 2009:6).

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. (SAK 1 September, 2009:3). Laporan keuangan tahunan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yaitu proses pengkomunikasian kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholder* lainnya.

Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari

pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. FASB, berpendapat bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus:

> "Dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengertian yang memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi serta mau mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang sewajarnya".

Tingkat penuh *(full disclosure)* menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah. Menurut pendapat Bekaouli (2006) mengatakan bahwa:

> "Pengungkapan penuh *(full disclosure)* mengharuskan laporan keuangan dirancang dan disusun laporan keuangan untuk menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan selama periode berjalan dan supaya mengandung informasi yang mencukupi guna membuatnya dan tidak menyesatkan bagi investor kebanyakan".

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan perusahaan harus memuat informasi yang penuh mencakup segala kejadian ekonomi selama satu periode operasi perusahaan.

c. Sifat Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Banyaknya informasi yang diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, akan tetapi juga pada standar yang dibutuhkan. Tiga sifat pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*)

Menurut Hendriksen (2002:432) ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu :

1. Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterprestasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung menyiratkan suatu etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan.

3. Pengungkapan penuh (*full disclosure*)

Pengungkapan penuh menyangkut penyajian informasi yang relevan. Bagi sebagaian orang pengungkapan penuh berarti penyajian informasi secara berlimpah sehingga tidak tepat. Menurut mereka, terlalu banyak informasi akan membahayakan. Karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsir.

d. Jenis Jenis Pengungkapan

Pengaruh pengungkapan secara luas akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan bagi banyak kalangan yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Khususnya bagi investor dan calon investor membutuhkan informasi untuk menilai waktu dan ketidakpastian

aliran kas sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga dapat menilai perusahaan dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat. Informasi yang diungkapkan dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosere*).

A. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam suatu laporan tahunan dan diatur oleh suatu peraturan pasar modal yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006 Menurut Bapepam, perusahaan yang telah melakukan penawaran umum wajib menerbitkan laporan tahunan. Laporan tahunan wajib memuat antara lain: (1) Iktisar Data Keuangan Penting; (2) Laporan Dewan Komisaris; (3) Laporan Direksi; (4) Profil Perusahaan; (5) Analisis Pembahasan Manajemen; (6) Tata Kelola Perusahaan *(Corporate Governance)*; (7) Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan; (8) Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit

B. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosere*)

Menurut Suwarjono (2005:583) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure)* adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan sukarela merupakan sinyal bagi investor dalam rangka

pengambilan keputusan dan tidak semua perusahaan publik mau menyajikan informasi secara sukarela terkait pertimbangan biaya dan manfaat yang diperoleh dengan melakukan pengungkapan sukarela (Reri, 2009:81).

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal.

Karena pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Meek, Robert, and Gray, 1995) dalam Dody (2007:69). Salah satu cara meningkatkan kreditabilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Teori persignalan (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela (Suwadjono, 2005:583). Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kreditabilitas kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

Beberapa penelitian akademik juga menunjukkan bahwa makin besar perusahaan makin banyak pengungkapan sukarela yang disampaikan (Suwadjono, 2005:584). Dari argumen di atas dapat disimpulkan Perusahaan yang memiliki motivasi untuk melakukan pengungkapan sukarela meskipun ada biaya yang harus ditanggung untuk melakukan pengungkapan tersebut. Umumnya perusahaan hanya akan mengeluarkan biaya tersebut jika ekspektasi akan manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pengungkapan.

Di dalam peraturan Bapepam dan LK No. Kep-134/BL/2006 dianjurkan untuk melakukan pengungkapan yang sifatnya tidak diwajibkan, sehingga dapat dijadikan sebagai item pengungkapan sukarela yang terdapat dalam dalam penelitian ini pengungkapan sukarela seperti yang digunakan oleh Choi dan Mueller (1992), Susanto (1992), Meek, Robert dan Gray Dewi (1995) dalam Fitri (2008) sebanyak 23 item, dikembangkan lagi dengan menambah item pengungkapan sukarela penelitian Rika (2010) sehingga menjadi 31 item pengungkapan sukarela.

Kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas. Menurut Dewi (2005), kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah suatu bentuk kualitas untuk menilai manfaat dari laporan keuangan tersebut. Di Indonesia, pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan oleh emiten atau perusahaan publik industri manufaktur ditetapkan oleh Bapepam dalam Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan suatu panduan penyajian dan

pengungkapan yang terstandarlisasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan bagi para pengguna

Pengukuran tingkat kelengkapan pengungkapan diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan *(disclosure index)* yaitu pengungkapan yang nyata dilaksanakan dibandingkan dengan pengungkapan yang seharusnya (daftar butir pengungkapan). Skoring pengungkapan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai 1 (satu) dan jika tidak diungkapkan akan diberi nilai 0 (nol).
2. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapat skor total.
3. Pengukuran indeks pengungkapan tiap perusahaan dilakukan dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan perusahaan.

Semakin banyak butir yang diungkapkan oleh perusahaan, semakin banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktek pengungkapan secara lebih komprehensif dibandingkan perusahaan lainnya.

2. Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek (Suci, 2009:26). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran adalah alat untuk mengukur (penggaris, meteran, jengkal); bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda; panjang, lebar, luas, besar, sesuatu; hasil mengukur.

Menurut Ismaya (2003:108) perusahaan adalah alat badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Jadi, bila pengertian ukuran dikaitkan dengan perusahaan, maka ukuran perusahaan dapat diartikan suatu alat yang digunakan untuk menentukkan besar atau kecilnya suatu badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba.

Menurut Udang-undang No.8 tahun 1997, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut keputusan BAPEPAM NO 9 Tahun 1995 berdasarkan ukuran perusahaan dapat digolongkan atas dua kelompok sebagai berikut :

a. Perusahaan Menengah/kecil

> Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: (1) memiliki sejumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp 20 miliar; (2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (3) bukan merupaka reksadana.

b. Perusahaan Menengah/besar

> Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik Negara/swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-undang No.20 tahun 2008 usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atas hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

10.000.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.00.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2008 perusahaan dapat dikatakan besar jika memiliki jumlah asset lebih dari Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.00.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

b. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Sobirin (2007:13) ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan jumlah karyawan, jumlah penjualan dan jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. *Size* merupakan salah satu atribut yang telah sering dihubungkan dengan pelaporan laporan keuangan (tahunan). Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam jumlah karyawan, jumlah penjualan, dan jumlah asset.

Semakin banyak jumlah karyawan, jumlah penjualan, dan jumlah asset semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga pengukuran ini digunakan untuk menentukkan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah karyawan maka semakin besar perusahaan, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin banyak jumlah asset maka semakin banyak modal ditanam.

Secara umum ukuran perusahaan diproksi dengan total aktiva. Ukuran perusaahan adalah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan meliputi aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan aktiva lain-lain yang dimiliki perusahaan sampai dengan tahun pelaporan keuangan (Rizal 2001:41).

3. *Agency Theory* Pada Struktur Kepemilikan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal)* mempekerjakan orang lain *(agent)* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Wien (2**010;14**). Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak manajer perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen.**

Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan sesuatu uang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Manajer (*agent*) menginginkan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, dan jam kerja yang fleksibel. Manajer akan mengharapkan bonus yang semakin besar dari kegiatan yang dilakukan selama memaksimalkan keuntungan pemegang saham.

Sedangkan pemegang saham mengharapkan pengembalian atas investasi dan laba yang besar dari kegiatan operasional perusahaan dengan *out cashflow* yang rendah. Sehubungan dengan dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam *agency theory*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004)

Agency relationship (hubungan keagenan) ada bilamana satu atau lebih individu yang disebut dengan *principal* bekerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut *agent*, prinsipal akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya.

Sedangkan manajer yang mempunyai persentase kepemilikan saham yang besar (manajer sebagai pemilik) dalam perusahaan, maka manajer akan cenderung melakukan tindakan

agar biaya yang dikeluarkan *(out cashflow)* oleh perusahaan kecil salah satunya dengan menghemat biaya pajak, sehingga bisa menghasilkan laba yang besar. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:353).

4. Kepemilikan Publik

a. Pengertian Kepemilikan Publik

Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. Seseorang pemegang saham ikut memiliki segala sesuatu yang menjadi milik perusahaan dan juga ikut dalam hal menangung resiko dan kewajiban perusahaan. Menurut Tandelilin (2001) seorang investor akan menghadapi dua kemungkinan atas kepemilikan tersebut, yaitu kemungkinan untung atau rugi.

Investor akan mendapatkan keuntungan apabila saham perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang baik, dan memberikan deviden yang memuaskan. Perusahaan akan tetap memiliki keuntungan lain dari nilai riil saham yang akan meningkat dengan adanya perkembangan struktur modal. Selain itu, keuntungan mungkin diperoleh dari penjualan saham (*capital gain*).

Sebaliknya, seseorang pemegang saham juga mempunyai kemungkinan rugi apabila perusahaan tersebut tidak mengalami

pertumbuhan yang baik. Walaupun perusahaan membagikan deviden, nilai riil perusahaan tersebut tidak mengalami kenaikan bahkan turun. Jika saham dijual di pasar sekunder. Kemungkinan yang mereka dapat adalah kerugian secara nominal maupun riil (jika memperhitungkan nilai waktu uang) atau disebut *capital loss.*

Struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan adalah media kontrol pemegang saham, terhadap perusahaan yang diwakili oleh dewan direksir dan manajer. Pemegang saham memantau dewan direksi dan manajer dalam setiap pengambilan keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seorang investor memerlukan keputusan yang teliti untuk melakukan transaksi saham. Keputusan dalam hal investasi saham meliputi keputusan untuk membeli, menjual dan menaham sahamnya.

Kepemilikan publik dapat juga disebut sebagai stuktur kepemilikan, yaitu jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori stuktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusi, domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan, dan individual domestik (Anindhita,2010:15-16).

Struktur kepemilikan perusahaan secara langsung akan menentukkan kecil kekuasan manajer relatif terhadap pemegang saham. Masalah stuktur kepentingan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Jika stuktur kepemilikan lebih banyak berada pada pemegang saham, maka pemegang saham akan dapat lebih leluasa mengontrol manajer, sehingga manajer akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Tetapi jika stuktur kepemilikan lebih banyak di tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan.

Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan yaitu kepemilikan oleh pihak luar dan oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan. Konsentrasi kepemilikan pihak luar dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's).* Konsentrasi kepemilikan pihak dalam dapat diukur dengan presentase kepemilikan terbesar yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaaan (*insider ownership's).*

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semua nya dianggap suara publik atau masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan luar/publik

menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan (Hilmi dan Ali,2008).

Kepemilikan publik menunjukkan tingkat kepercayaan oleh masyarakat publik, yaitu pihak individu diluar manajemen perusahaan serta institusi lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Saham publik merupakan jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar atau para pemegang saham yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut (Dwi,2010:55).

Berdasarkan penelitian Anindhita (Dwi,2010:20) ada tiga karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti:

a) Kepemilikan Menyebar

Perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi.

b) Kepemilikan Terkonsentrasi

Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu kepemilikan saham pengendalian dan kepemilikan saham minoritas.

c) Kepemilikan dalam BUMN

Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaanya.

Pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk. Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dan manajemen, dan pihak manajemen dengan kreditur.

Menurut Dody (2007:70-72), ada empat struktur kepemilikan, yaitu:

a) Proporsi kepemilikan manajemen

Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yamg dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen.

b) Proporsi kepemilikan institusi domestik

Kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum serta institusi lainnya pada akhir tahun.

c) Proporsi kepemilikan institusi asing

Kepemilikan saham oleh investor atau perusahaan asing yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor atau perusahaan asing.

d) Proporsi kepemilikan publik

Perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara luas kepada publik merupakan hal lazim dijumpai di negara-negara yang sudah maju. Sebaliknya hal tersebut masih merupakan sesuatu yang langkah dilingkungan negara-negara yang sedang berkembang.

Pola kepemilikan yang lazim terjadi di negara-negara sedang berkembang adalah terjadi nya dominasi kepemilikan terhadap perusahaan-perusahaan publik atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan publik pada umumnya dimiliki oleh lingkungan keluarga yang sangat dekat dan masih ada kendali keluarga.

b. Pengukuran kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar atau oleh para pemegang saham yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Pengukuran kepemilikan publik dihitung dengan cara sebagai berikut (Dwi, 2010:56).

$$kepemilikan\ publik = \frac{Jumlah\ saham\ publik}{Total\ saham\ perusahaan}$$

5. Leverage

a. Pengertian *Leverage*

Dalam manajemen keuangan *leverage* adalah penggunaan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Menurut Kasmir (2008: 151-152) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang

dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio leverage yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* lebih rendah tentu mempunyai resiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian pada saat perekonomian tinggi.

Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio *leverage* dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, di samping aktiva yang dimilikinya.

Leverage dapat dibedakan atas dua jenis yaitu *operating leverage* dan *financial leverage.* Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan berasal dari pemegang saham ataupun investor.

Agus (2001:120) menyatakan *financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%. Hal ini tentu tidak terjadi pada perusahaan *go publik.* Penggunaan hutang itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi yaitu :

1. Pemberian kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan.
2. Dengan menggunakan hutang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan akan meningkatkan keuntungannya.
3. Dengan menggunakan hutang maka pemilik memperoleh dan tidak akan kehilangan pengendalian perusahaan.

Menurut Brigham and Houston (2001) *leverage* merupakan penggunanaan pembiayaan dengan hutang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara hutang terhadap modal maupun asset. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang ataupun pihak luar dengan kemampuan yang digamatkan oleh modal (Harahap, 2004). Dalam manajemen keuangan perusahaan pada umumnya dikenal tiga macama *leverage* yaitu *operating leverage, financial leverage* dan *total leverage* (Lukman, 2004).

1. *Operating leverage*

   Operating leverage timbul karena adanya *fixed operating cost* yang digunakan dalam perusahaan untuk menghasilkan *income.* Menurut batasnya *fixed operating cost* tidak berubah dengan adanya perusahaan pada volume penjualan. Apabila terjadi peningkatan terhadap volume penjualan ini akan menyebabkan naiknya EBIT, sebaliknya apabila

terjadi penurunan terhadap penjualan maka akan menurunkan EBIT.

2. *Financial Leverage*
   Financial leverage timbulk karena adanya kewajiban-kewajiban keuangan yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan. Kewajiban-kewajiban keuangan yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perusahaan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan.

3. *Total Leverage*
   Total leverage adalah pengaruh gabungan *operating leverage* dengan *total leverage.* Kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap (biaya operasi/biaya tetap financial) untuk memperbesar pengaruh volume penjualan terhadap EPS.

b. Jenis-jenis *leverage*

Menurut Tri (2011:36) Secara garis besar, rasio *leverage* dapat dihitung dengan menggunakan 4 rasio, yaitu :

1) *Debt ratio*

Debt ratio merupakan perbandingan antara total utang perusahaan dengan total aktiva perusahaan. Rasio yang dikenal dengan rasio utang ini mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya dengan menggunakan total aktiva perusahaaan. Selain itu, rasio ini juga memperlihatkan besarnya dana yang berasal dari utang dari keseluruhan dana perusahaan.

Kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah karena semakin rendah rasio ini, maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa

likuidasi. Di sisi lain, pemegang saham akan menginginkan *leverage* yang lebih besar karena akan meningkatkan laba yang diharapkan.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\textit{Debt ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2) *Debt to equity ratio*

Debt too equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan modal sendiri perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan oleh perusahaan.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\textit{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (equity)}}$$

3) *Time interest earned*

Time interest earned digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban tetap berupa bunga. Semakin tinggi rasio, semakin mampu suatu perusahaan dalam membayar bunga atas segala utang-utangnya.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$time\ interest\ earnesd = \frac{EBIT}{Beban\ Bunga}$$

4) *Total debt leverage*

Total debt leverage ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada kreditur, baik berupa bunga maupun pinjaman pokok.

Rasio ini dapat diukur dengan rumus :

$$total\ debt\ leverage = \frac{EBIT + \text{pembayaran } lease}{Beban\ bunga + \text{Pembayaran } lease}$$

c. Tujuan dan manfaat *leverage*

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Kasmir (2008:153-154) Ada Beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan *leverage* yakni:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage*;
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai hutang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya.

Kesimpulannya adalah dengan analisis *leverage*, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak.

d. Pengukuran *Leverage*

Penelitian ini menggunaka *financial leverage* untuk menilai seberapa besar nilai hutang dalam membiayai investasi perusahaan. *Financial leverage* dapat diukur dengan membandingkan total hutang dengan total aktiva (Reri, 2009:32).

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aktiva}$$

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2008:156).

Rasio ini menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan *leverage* keuangan yang tinggi. Penggunaan *financial leverage* yang tinggi akan meningkatkan rentabilitas modal saham (*ROE*) dengan cepat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham akan menurun cepat pula (Mamduh, 1995: 81-82).

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena mengkhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang.

6. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya penelitian yang dilakukan Iwan (2001) yang menganalisis tentang analsis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela informasi laporan tahunan perusahaan di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1999. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan tepat pada waktunya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan, ukuran perusahaan, umur emiten, jenis industri dan basis perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) yang menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur tang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan sampel 34 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 2002. Hasil pengujian yang menggunakan regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel *Leverage*, Likuiditas, Profitabilitas, Porsi Kepemilikan Saham oleh Publik dan Umur Perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Aida (2006) yang menganalisis tentang pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Jakarta pada tahun 2002-2004. Penelitian ini menggunakan 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan periode 3 tahun, yaitu dari tahun 2002-2004. Hasil pengujian yang menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh hasil bahwa Likuiditas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan tahunan.

Bambang (2006) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan yang terdiri dari *leverage*, likuiditas, profitabilitas, porsi saham publik, ukuran perusahaan, status perusahaan, umur perusahaan, *Operating profit margin, net profit margin* dan *return on equity*. Empat variabel independen yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, porsi saham publik dan status perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dan enam variabel lainnya yakni *leverage*, *likuiditas, return on total asset, return on equity, operating profit margin* dan *net profit margin* tidak berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Luciana dan Ikka (2007) yang menganalisis tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapkan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada

tahun 2001-2004. Penelitian ini menemukan hasil bahwa karakteristik perusahaan yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan (wajib dan sukarela) adalah variabel rasio likuiditas, ukuran perusahaan dan status perusahaan, sedangkan variabel yang mempengaruhi pengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib yaitu variabel rasio likuiditas, rasio *leverage*, *size* perusahaan dan status perusahaan.

Ayu (2008) mengenai pengaruh manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT BEJ dari tahun 2002-2006 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 44 sampel perusahaan yang bergerak dalam manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dimana perusahaan yang melakukan tindakan manajemen laba maka informasi-informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan akan semakin banyak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dimana semakin besar perusahaan maka informasi-informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan akan semakin banyak

Hossain (2008) yang menganalisis tentang *the extent of disclosure in annual report of banking companies the case of india*. Penelitian ini menggunakan 184 perbankan yang terdaftar di India yaitu dari tahun 2002-2003. Hasil pengujian yang menggunakan analisis regresi berganda

diperoleh hasil bahwa, Ukuran, Profitabilitas, *Broad composition of Business* dan Aset secara signifikan positif mempengaruhi tingkat pengungkapan.

Meliana (2009) yang menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan dan implikasinya terhadap asimetri informasi studi pada perusahaan-perusahaan sector manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2007. Penelitian ini menemukan hasil bahwa karakteristik perusahaan yang dikaitkan dengan struktur perusahaan hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sedangkan untuk tingkat *leverage* dan porsi kepemilikan saham publik ditemukan tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. karakteristik perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan (likuiditas dan profitabilitas) ditemukan tidak berpengaruh positif terhadap variasi luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan karakteristik perusahaan yang dikaitkan dengan pasar perusahaan daya tarik bersifat non keuangan (ukuran KAP dan skope bisnis) berpengaruh positif terhadap variansi luas pengungkapan perusahaan.

Suci (2009) yang menganilisi tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan status perusahaan terhadap luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menemukan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap luas

voluntary disclosure laporan keuangan tahunan sedangkan *leverage* dan status perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan.

Rika (2010) yang menganalisis tentang pengaruh manajemen laba dan likuiditas terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan pada perusahaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2007. Penelitian ini menemukan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan sedangkan Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan.

Ali (2011) yang menganalisis tentang *firm characteristic and voluntary disclosure of graphs in annual report of turkish listed companies.* Penelitian ini menggunakan 100 perusahaan yang terdaftar di *istanbul stock exchange* selama tahun 2008. Penelitian ini menemukan hasil bahwa *Firm Size* dan auditor berpengaruh signifikan positif terhadap *voluntary disclosure level of graphs* sedangkan Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap *voluntary disclosure level of graphs.*

7. Hubungan Antar Variabel Penelitian

a. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan merupakan sesuatu yang dapat mengukur untuk menentukan nilai dari besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total aktiva diharapkan berhubungan positif dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan kecil. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan mempunyai ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Ukuran perusahaan ini merupakan variabel yang sering diteliti, dan hasilnya cukup konsisten berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Menurut Suwadjono (2005:584) mengatakan bahwa beberapa penelitian akademik juga menunjukkan bahwa makin besar perusahaan makin banyak pengungkapan yang disampaikan. Diantaranya studi yang dilakukan Ayu (2008) dan Suci (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan.

Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Ada empat argumen yang dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang lebih besar mungkin untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan kecil.

Pertama, perusahaan besar lebih dimungkinkan mempunyai biaya produksi informasi atau biaya kerugian persaingan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Kedua, perusahaan besar dimungkinkan mempunyai dasar pemilikan yang lebih luas, sehingga diperlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan dari pemegang saham.

Ketiga, perusahaan besar lebih mungkin untuk merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tinggi, yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan yang canggih. Keempat, manajer perusahaan lebih kecil tampaknya percaya bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan dapat membahayakan potensi kompetitif perusahaan (Aida, 2006:16).

Penjelasan lain yang merupakan tambahan penjelasan diatas adalah perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap.

Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu ada tambahan biaya yang lebih besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain.

Berdasarkan beberapa studi dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan. Dimana semakin besar perusahaan maka akan semakin luas tingkat kelengkapan pengungkapan.

Karena perusahaan besar mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah yang berkaitan dengan pengungkapan mereka. Lebih banyak pemegang saham pada perusahaan berukuran besar juga memerlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan para pemegang saham tersebut di pasar. karena perusahaan ingin menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan mempunyai kepastian yang lebih besar sehingga mengurangi ketidakpastian mengenai propspek perusahaan ke depan.

b. Hubungan Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan

Pemilik perusahaan dari pihak publik dianggap berbeda dari pihak manajerial, dimana kecil kemungkinan publik untuk terlibat dalam urusan bisnis sehari-hari. Pemilik perusahaan dari publik kepentingan untuk mengetahui tingkat kembalian atas investasi mereka. Oleh sebab itu mereka membutuhkan informasi yang membantu mereka untuk memutuskan tindakan mereka, apakah akan membeli, menahan atau menjual suatu perusahaan. Selain itu pemilik perusahaan dari publik juga ingin mengetahui kemampuan perseroan untuk membayar deviden. Informasi mengenai perkembangan dan kondisi perusahaan tercermin dalam laporan keuangan (Ang, 1977) dalam (Nidya, 2011:41)

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupak kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan publik maka akan mengubah pengelolahan perusahaan yang semula berjalan dengan kehendak hati manajerial menjadi perusahaan yang berjalan dengan pengawasan. Akibatnya keleluasaan manajerial menjadi terbatas (Nidya, 2011:41).

Hal ini karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir

yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin lengkap. Saham yang dimiliki oleh masyarakat atau individu digolongkan dalam saham publik, dan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau individu dan organisasi yang memiliki hubungan dengan perusahaan digolongkan saham perusahaan.

Investor publik membutuhkan perlindungan atas investasi yang telah ditanamkan. Perlindungan itu berupa jaminan dari emiten bahwa informasi baik keuangan maupun non keuangan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan para investornya.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan investor publik, perusahaan akan mengungkapkan laporan keuangannya secara lengkap dan tanggungjawab. Dapat dipahami bahwa semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh umum menyebabkan perusahaan lebih serius dalam memberikan informasi perusahaan kepada umum, artinya semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya (Dewi, 2005:38).

Penelitian tentang kepemilikan publik ini telah diteliti oleh (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:357) dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepemilikan publik dengan kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan juga Penelitian yang dilakuan oleh dwi (2010:55) membuktikan semakin besar porsi kepemilikan publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin

banyak pula butir-butir informasi yang mendetail dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan. Semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkap dalam laporan tahunan.

Berdasarkan beberapa studi dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proporsi saham publik memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan. Semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh umum menyebabkan perusahaan lebih serius dalam memberikan informasi perusahaan kepada umum, artinya semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya.

Dan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut umtuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin lengkap. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi saham publik yang besar cenderung lebih lengkap dalam mengungkapkan informasi perusahaannya.

c. Hubungan *Leverage* terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan dikatakan solvabel, apabila memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk menutup hutang-

hutangnya baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang dilikuidasi (Prayogi, 2003:27).

Rasio *leverage* mengambarkan sampai sejauh mana aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan banyak dibiayai oleh investor atau kreditur luar. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang (Denny, 2011:61).

Bagi investor keputusan yang diinginkan adalah membeli, menjual, mempertahankan saham dan keputusan kreditor adalah berkaitan dengan kredit atau perpanjangan kredit kepada perusahaan. Pihak kreditor akan selalu memantau dan memerlukan informasi mengenai keadanaa finansial debitor untuk menyakinkan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Seiring dengan tuntutan kreditor akan informasi tersebut, maka perusahaan dengan rasio hutang (*leverage)* yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang lebih luas (Suci, 2009).

Perusahaan dapat menyakinkan pembaca laporan tahunan bahwa perusahaan mampu membayar hutang. Semakin besar *leverage* perusahaan, semakin besar kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham dan manajer. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang.

Hasil penelitian (Luciana dan Ikka, 2007:12) pengaruh rasio *leverage* terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela terdapat hubungan positif. Maka perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Semakin tinggi rasio *leverage* maka perusahaan akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif.

Dan hasil penelitian Dewi (2005:71) juga membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan. Hal ini disebabkan pada perekonomian yang membaik, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk memeproleh laba yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk lebih mengungkapkan butir-butir laporan keuangan secara lengkap untuk tetap mempertahankan kepercayaan pada krediturnya.

Berdasarkan beberapa studi dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan. Di mana dengan *leverage* yang tinggi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lebih komprehensif, karena perusahaan yang berleverage harus mengungkapkan lebih banyak informasi utnuk mencukupi kebutuhan kreditor akan informasi.

B. Kerangka Konseptual

Tujuan utama suatu laporan tahunan adalah memberikan informasi dalam pembuatan keputusan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan suatu informasi yang penting bagi investor.

Dengan adanya informasi dari perusahaan dalam laporan keuangan, maka investor dapat menganalisis tingkat risiko dan kepastian untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Akan tetapi, perusahaan akan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperolehnya dalam melakukan pengungkapan informasi, baik itu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan suatu perusahaan di dalam laporan keuangan. Dengan adanya pengungkapan terhadap laporan keuangan dapat dilihat apakah perusahaan telah menyajikan informasi keuangan di dalam laporan keuangannya sesuai dengan indeks pengungkapan yang telah ditetapkan oleh Bapepam yang tergolong pengungkapan wajib sedangkan pengungkapan sukarela adalah informasi yang diperoleh selain dari pengungkapan wajib.

Pihak manajemen tidak selalu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di dalam laporan keuangan, hal ini terjadi karena manajer diberi keleluasaan dalam memilih metode akuntansi dalam pengungkapan

informasi keuangan yang dimiliki perusahaan. Dalam laporan keuangan, manajemen akan melakukan pengungkapan yang seperlunya.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan. Pengukurannya dapat dilakukan melalui total aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar aktiva yang dimiliki suatu perusahaan maka dapat dikatakan perusahaan itu besar.

Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki sumberdaya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai persediaan informasi untuk keperluan internal.

Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relative kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu ada tambahan biaya yang relative besar untuk dapat melakukan pengungkapan secara selengkap yang dilakukan perusahaan besar.

Hubungannya dengan kelengkapan pengungkapan yaitu apabila semakin besar suatu perusahaan maka secara otomatis perusahaan tersebut memiliki informasi yang banyak, sehingga memungkinkan manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara luas dalam laporan

keuangan tahunan. Perusahaan besar juga dimonitor secara lebih ketat sehingga butuh pengungkapan yang luas.

Selain itu, karakteristik perusahaan yang perlu diperhatikan manajemen dalam melakukan pengungkapan adalah kepemilikan publik, Perusahaan yang telah *go public*, saham-sahamnya bebas dimiliki. Kepemilkan publik diukur dengan rasio jumlah saham yang dimiliki masyarakat dengan total saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan (deviden) yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*). Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin lengkap.

Bagian lain yang mempengaruhi luasnya pengungkapan yang diungkapkan manajemen dalam laporan keuangan tahunan perusahaan adalah *leverage*. Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva. Perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi menangung biaya pengawasan yang tinggi.

Jika menyediakan informasi secara komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif.

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang cukup tinggi dalam memodali financial perusahaan mungkin akan melakukan pengungkapan lebih lengkap dibandingkan perusahaan yang tidak ber*leverage*.

Hubungan ini dasarkan bahwa kreditor harus mempunyai informasi yang cukup terhadap perusahaan terhadap perusahaan yang didanainya. Jadi atas permintaan kreditor akan kebutuhan informasi tersebut maka manajemen perusahaan mungkin akan melakukan pengungkapan yang lebih lengkap.

Akan tetapi jika dilihat dari besarnya manfaat yang diperoleh atas pengungkapan yang dilakukan mungkin saja manajemen perusahaan enggan untuk melakukan pengungkapan karena belum tentu perusahaan yang dibiayai dengan *leverage* merupakan perusahaan yang besar yang memiliki banyak dana untuk melakukan pengungkapan secara lengkap.

Pengungkapan laporan keuangan perlu dilakukan agar pihak eksternal memiliki penilaian dan kepastian mengenai perusahaan, dengan sendirinya perusahaan telah menyajikan informasi yang benar dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomis.

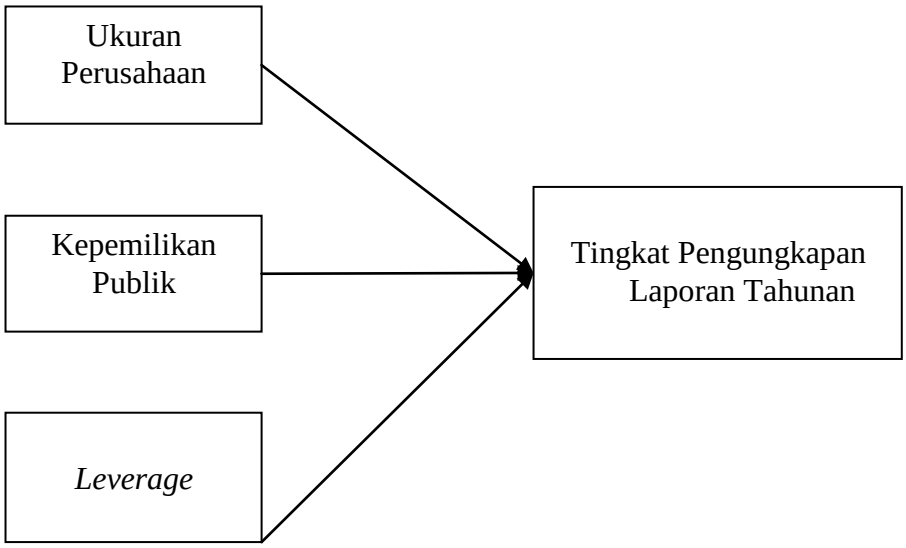

Gambar 1. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan

H2: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai "Ukuran perusahaan, Kepemilikan publik dan *Leverage* terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia" adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan besar kecilnya ukuran perusahaan yang tercermin dalam total aktiva (H_1 ditolak).
2. Kepemilikan Publik mempunyai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur. Artinya semakin besar presentase kepemilikan publik/investor luar perusahaan, semakin rendah tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Karena investor luar/publik kurang memperhatikan tentang tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Rendahnya kualitas tingkat pengungkapan informasi perusahaan diduga salah satu penyebabnya adalah adanya kecenderungan konsentrasi kepemilikan tersebut. Konsentrasi kepemilikan oleh pemegang saham

keluarga atau kendali oleh keluarga masih dipandang oleh pasar cenderung mempengaruhi informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan untuk kepentingan kalangan yang sangat terbatas saja yaitu pihak keluarga pengendali perusahaan. (H_2 diolak).

3. *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin rendah kelengkapan pengungkapan laporan keuanganya (H_3 ditolak).

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Periode penelitian ini hanya dilakukan selama 4 tahun (2007-2010), karena peneliti mempedomani item tingkat kelengkapan pengungkapan yang dikeluarkan Bapepam dan LK No. Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten (Perusahaan Publik). Dengan adanya keterbatasan rentang waktu tersebut, maka penelitian ini kurang dapat digeneralisasi dengan baik.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri perusahaan yang *listing* di BEI yaitu manufaktur, sehingga jumlah sampel yang bisa terpenuhi sesuai kriteria pemilihan sampel secara *purposive* hanya 30 perusahaan. Hal tersebut menyebabkan penelitian ini kurang dapat digeneralisasi dengan baik.

C. Saran Penelitian

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan emiten hendaknya meningkatkan item tingkat kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan yang dianjurkan oleh peraturan yang berlaku seperti peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memajukan pasar modal Indonesia sehingga akan berdampak positif bagi perkembangan perusahaan emiten dimasa mendatang.
2. Bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia sebaiknya memperhatikan informasi-informasi yang diungkapkan oleh perusahaan emiten. Hal ini penting untuk dicermati agar dapat mengetahui prospek perusahaan dalam menghasilkan pengembalian yang akan diterima investor dalam bentuk dividen.
3. Penelitian selanjutnya perlu diidentitivikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan seperti solvabilitas, profitabilitas, status perusahaan, umur perusahaan, *operating profit margin, net profit margin* dan *return on equity* dan dapat menggunakan jenis perusahaan yang berbeda, menambahkan sampel perusahaan lebih banyak dan rentang waktu penelitian yang lebih dari 4 tahun misalnya lima tahun terakhir agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.